

DAMPAK ADOPTSI IFRS TERHADAP PANJANG LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Zahra Argadia Garini dan Muanas
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia
Email : lemlit@stiekesatuan.ac.id

*Dampak Adopsi
IFRS terhadap
Panjang Laporan
Keuangan
Perusahaan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia*

ABSTRACT

As a member of G-20 Forum, Indonesia starts to adopts the International Financial Reporting Standard (IFRS) as a requirement to fulfill the demands and needs of financial statements users. The adoption of international accounting standards into national accounting standards aim to create financial statements that have high level of credibility and accountability. IFRS requests the requirement of high level of disclosure items so the value of companies will increase, management will have high level of accountability to run the company, that allows changes on the financial statements, for example that can change the length of financial statements. The purpose of this study is to know the effect of IFRS adoption on the length of financial statements, and to know the content of financial statements before and after IFRS adoption. This study was conducted by dividing financial statements into two sections, which are major statements and notes to the financial statements. The financial statements used in this study are 2008 and 2013. The sample was selected by purposive sampling method and analyzed using parametric and non-parametric tests. Results of this study show that major statements and notes to the financial statements experienced an increase in length after adopting IFRS. Notes to financial statements experiencing the most significant increase in length after adopting IFRS. On the major statements, the increase is caused by other comprehensive income account. While on the notes to the financial statements, increase is caused by implementation of PSAK 1 which requires the high level of disclosures. The increase mainly occurred in accounting policy on the financial statements.

Keywords: IFRS and Financial Statement

PENDAHULUAN

Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. IFRS meminta persyaratan akan *item-item* pengungkapan yang semakin tinggi, sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi dan manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, serta dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Petreski, 2005).

Di samping adanya syarat pengungkapan yang tinggi pada laporan keuangan, karakteristik IFRS lainnya yaitu munculnya laba komprehensif lain (*Other Comprehensive Income-OCI*). Pada laporan keuangan, OCI muncul dari transaksi-

170

Submitted:
JANUARI 2017

Accepted:
OKTOBER 2017

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 5 No. 2, 2017
pg. 086-181
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

transaksi yang berkaitan dengan penilaian terhadap nilai wajar seperti revaluasi aset tetap (PSAK 16), penjabaran laporan keuangan mata uang asing ke mata uang pelaporan (PSAK 10), perubahan aktuarial dalam imbalan kerja manfaat pasti (PSAK 24), perubahan nilai wajar dalam investasi yang tersedia untuk dijual (PSAK 50 dan 55), serta perubahan nilai wajar terhadap lindung nilai arus kas (PSAK 50 dan 55).

Dengan berbagai karakteristik IFRS yang ada, maka memungkinkan terjadinya perubahan pada laporan keuangan, misalnya terjadi penambahan akun pada laporan utama, perincian akun yang lebih jelas, ataupun penjelasan yang lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa hal tersebut memungkinkan terjadinya perubahan pada panjang laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah : Irton (2010:128) menyatakan bahwa Standar akuntansi serta interpretasi-interpretasinya diadopsi oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Sebelum berubah menjadi IFRS seluruh standar akuntansi internasional mengacu pada standar akuntansi internasional (*International Accounting Standards*). IASB mengadopsi seluruh standar akuntansi internasional dan melanjutkan pengembangannya menjadi Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Sumber acuan utama dalam menyusun laporan keuangan adalah standar akuntansi keuangan yang disusun oleh suatu badan yang kompeten dan independen. Di Indonesia berlaku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (Kartikahadi *et al.*, 2012:33).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan (*full adoption*) (IAI, 2009).

Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2. Mengurangi biaya SAK
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan
5. Meningkatkan transparansi
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Menurut PSAK nomor 1, Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggambarkan pola hubungan (asosiatif) antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik.

Pengujian yang akan dilakukan yaitu uji statistik deskriptif dan uji normalitas untuk menentukan apakah data berdistribusi normal. Apabila data berdistribusi normal,

maka menggunakan analisis statistik parametris dan akan dilakukan uji t dua sampel berpasangan, yaitu jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Adopsi IFRS Terhadap Panjang Laporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

I. Dampak Adopsi IFRS Terhadap Panjang Laporan Keuangan

Dalam penelitian ini, laporan keuangan perusahaan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu laporan utama dan catatan atas laporan keuangan. Laporan utama sebelum periode adopsi IFRS terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sedangkan catatan atas laporan keuangan di dalamnya termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi penting.

Pada periode setelah adopsi IFRS, komponen laporan keuangan ditambah dengan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Namun dari lima puluh perusahaan yang dijadikan sampel, tidak ada satupun perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tersebut. Sehingga komponen laporan keuangan setelah periode adopsi IFRS yang diuji tetap berjumlah sama dengan komponen laporan keuangan sebelum periode adopsi IFRS.

Perhitungan yang dilakukan pada panjang laporan utama secara manual menunjukkan bahwa sejumlah sampel tidak mengalami peningkatan panjang laporan utama pada periode setelah adopsi IFRS. Sebanyak 28% sampel laporan utama mengalami penurunan panjang dibandingkan dengan periode sebelum adopsi IFRS. Sebanyak 32% sampel laporan utama yang diuji memiliki panjang yang sama antara periode sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 40% mengalami penambahan panjang laporan utama.

Berdasarkan hasil perhitungan manual pada catatan atas laporan keuangan, sebanyak 10% sampel mengalami penurunan panjang pada catatan atas laporan keuangan setelah periode adopsi IFRS. Namun sampel lain mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelum adopsi IFRS. Selain itu, jumlah panjang catatan atas laporan keuangan terlihat lebih menyebar dibandingkan dengan panjang laporan utama.

Melalui uji statistik deskriptif yang dilakukan, rata-rata panjang halaman pada laporan utama mengalami peningkatan setelah periode adopsi IFRS. Meskipun begitu, bila dilihat dari hasil uji *Wilcoxon*, nilai peningkatan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penambahan panjang yang signifikan antara laporan utama tahun 2008 dibandingkan laporan utama tahun 2013. Hasil uji statistik terhadap laporan utama dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Patralalita (2014). Penelitian Patralalita (2014) menunjukkan bahwa laporan utama tidak mengalami penambahan panjang yang signifikan secara statistik.

Pada catatan atas laporan keuangan, hasil uji statistik menunjukkan nilai rata-rata mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Selain itu, hasil uji t *paired sample* menunjukkan nilai signifikan yang berarti terdapat penambahan panjang catatan atas laporan keuangan antara sebelum dan setelah adopsi IFRS. Hasil penelitian ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Morunga dan Bradbury (2012) serta sesuai dengan penelitian Patralalita (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan panjang kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan meningkat signifikan secara spesifik. Pada penelitian Patralalita (2014), perubahan panjang catatan atas laporan keuangan merupakan perubahan terbesar dibandingkan dengan perubahan laporan utama dan perubahan kebijakan akuntansi.

Contoh perubahan panjang laporan keuangan perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Panjang halaman laporan keuangan PT Mahaka Media Tbk.
sebelum dan sesudah periode adopsi IFRS

Komponen Laporan Keuangan	Tahun	
	2008	2013
Laporan Posisi Keuangan	2,0 halaman	3,0 halaman
Laporan Laba Rugi	1,0 halaman	1,5 halaman
Laporan Perubahan Ekuitas	1,0 halaman	1,0 halaman
Laporan Arus Kas	1,0 halaman	1,0 halaman
Catatan Atas Laporan Keuangan	38,5 halaman	55,5 halaman

Berdasarkan hasil perhitungan panjang laporan keuangan PT Mahaka Media Tbk., terlihat bahwa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi mengalami peningkatan panjang halaman setelah periode adopsi IFRS. Meskipun begitu, jumlah peningkatannya tidak terlalu tinggi. Sedangkan pada laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, panjang halaman tidak berubah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan komponen yang paling terlihat signifikan mengalami peningkatan panjang halaman. Peningkatan tersebut berkaitan dengan syarat pengungkapan yang tinggi sebagai dampak dari adopsi IFRS.

II. Informasi dalam Laporan Keuangan Setelah Adopsi IFRS

Dari hasil pengujian statistik yang dilakukan, dapat dilihat bahwa rata-rata laporan utama dan catatan atas laporan keuangan mengalami penambahan panjang. Meskipun begitu, peningkatan yang terjadi pada laporan utama tidak signifikan. Peningkatan yang signifikan hanya terjadi pada catatan atas laporan keuangan saja.

Pada laporan utama, penambahan informasi yang ada yaitu mengenai pendapatan komprehensif lain. Meskipun perkiraan mengenai pendapatan komprehensif lain bukanlah hal baru dalam PSAK sebelumnya, namun pendapatan komprehensif lain dalam IFRS muncul dari lebih banyak transaksi yang berkaitan dengan penilaian terhadap nilai wajar. Akun pendapatan komprehensif lain ini muncul dalam laporan laba rugi tahun 2013 dimana perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel sudah menerapkan PSAK berbasis IFRS.

Akun pendapatan komprehensif lain dalam laporan utama yang dijadikan sampel terutama banyak berasal akibat laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual serta akibat selisih kurs penjabaran mata uang asing. Selain pada laporan laba rugi, akun pendapatan komprehensif lain akan muncul dalam laporan perubahan ekuitas perusahaan.

Selain akun pendapatan komprehensif lain, dalam laporan utama tidak banyak penambahan informasi. Di beberapa perusahaan ada penambahan akun provisi pada

laporan posisi keuangan tahun 2013. Akun ini muncul karena perusahaan memiliki liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Pengaturan mengenai provisi dijelaskan di dalam PSAK 57 yang mulai berlaku dan diterapkan di perusahaan mulai 1 Januari 2011. Selain penambahan akun, perubahan yang terjadi pada laporan utama hanya perubahan mengenai nama-nama akun.

Menurut PSAK 1 (revisi 2009), komponen laporan utama lengkap yang disajikan dalam laporan keuangan bertambah menjadi enam item dimana sebelum periode adopsi IFRS hanya berjumlah lima item, yaitu:

1. laporan posisi keuangan pada akhir periode,
2. laporan laba rugi komprehensif selama periode,
3. laporan perubahan ekuitas selama periode,
4. laporan arus kas selama periode,
5. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan
6. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Meskipun terjadi penambahan komponen laporan keuangan lengkap, namun dari lima puluh sampel perusahaan yang diuji, tidak ada satu perusahaan yang menyajikan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Hal ini karena laporan bukan menjadi laporan yang rutin dibuat oleh perusahaan, melainkan hanya dibuat apabila perusahaan menerapkan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Sehingga hal tersebut bukan penyebab utama penambahan panjang dari laporan utama

Selama tahun 2008 sampai 2013, terdapat beberapa PSAK adopsi IFRS yang dapat mempengaruhi laporan utama misalnya PSAK 2 mengenai Laporan Arus Kas, PSAK 4 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 23 mengenai Pendapatan, PSAK 56 mengenai Laba per Saham, dan lain-lain. Namun penerapan PSAK tersebut nyatanya tidak berpengaruh terhadap perubahan panjang laporan utama. PSAK tersebut hanya berpengaruh terhadap perubahan nilai akun dalam laporan utama ataupun terhadap pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap panjang laporan utama, diketahui bahwa sebanyak 14 perusahaan mengalami penurunan panjang laporan utama pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2008. Sebagian besar penyebab penurunan ini diakibatkan karena pada tahun 2008 perusahaan menambahkan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas. Pengungkapan tambahan ini ditambahkan pada laporan arus kas perusahaan. Informasi yang tercantum misalnya reklasifikasi persediaan dan uang muka ke aset tetap, penghapusan aset tetap, penjualan investasi pada perusahaan asosiasi yang dicatat pada piutang lain-lain, penambahan investasi jangka panjang melalui piutang lain-lain, dan sebagainya. Informasi tambahan tersebut cukup banyak jumlahnya sehingga berpengaruh terhadap panjang laporan keuangan perusahaan sebelum periode adopsi IFRS.

Meskipun jumlah sampel laporan utama sebagian besar mengalami peningkatan panjang, namun jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah total sampel yang diuji. Sehingga dari uji statistik yang dilakukan, didapatkan hasil yang menyatakan bahwa

tidak terdapat penambahan panjang yang signifikan antara laporan utama sebelum dan sesudah periode adopsi IFRS.

Pada catatan atas laporan keuangan, hal yang mempengaruhi penambahan panjang yaitu adanya penerapan PSAK 1 (revisi 2009) mengenai Penyajian Laporan Keuangan yang mulai diterapkan 1 Januari 2011. PSAK mensyaratkan adanya pengungkapan yang tinggi pada laporan keuangan sehingga menyebabkan catatan atas laporan keuangan pada perusahaan yang diuji mengalami perubahan panjang yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,000.

Perusahaan yang menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) akan menyajikan catatan atas laporan keuangan yang sistematis, karena hal itu merupakan salah satu persyaratan yang tercantum dalam PSAK 1. Selain itu, masing-masing pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tahun 2013 dari perusahaan yang dijadikan sampel secara umum mencakup hal-hal berikut dan biasanya disajikan secara berurutan:

- a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK (sebagaimana diwajibkan oleh paragraf 17)
- b. Dasar akuntansi
- c. Kebijakan akuntansi signifikan
- d. Informasi pendukung untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai urutan penyajiannya; dan (misalnya peristiwa setelah periode pelaporan (PSAK 8), informasi segmen operasi (PSAK 5), dan pengungkapan pihak-pihak berelasi (PSAK 7); dan
- e. Pengungkapan nonkeuangan (misalnya kebijakan pengelolaan risiko)

Sesuai dengan PSAK 1, pada catatan atas laporan keuangan diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Domisili dan bentuk hukum entitas, negara tempat pendirian, dan alamat kantornya.
2. Penjelasan tentang sifat operasi dan kegiatan utama entitas
3. Nama induk perusahaan dan perusahaan *holdingnya*

PSAK 1 lebih jauh mensyaratkan pengungkapan informasi berikut terkait dengan dividen:

1. Jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah dividen per lembar saham.
2. Jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Patralalita (2014), catatan atas laporan keuangan dihitung secara terpisah dengan kebijakan akuntansi. Sedangkan pada penelitian ini, perhitungan panjang kebijakan akuntansi disatukan dengan panjang catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjadi salah satu penyebab penambahan panjang yang terjadi pada laporan keuangan periode setelah adopsi IFRS. Aturan mengenai kebijakan akuntansi ini tercantum dalam PSAK 25 (revisi 2009) mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2011.

PSAK 25 (revisi 2009) bertujuan untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Kebijakan akuntansi adalah serangkaian prinsip, dasar, konvensi,

peraturan, dan praktik spesifik yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Pada catatan atas laporan keuangan perusahaan tahun 2013 yang dijadikan sampel, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi menjadi salah satu bagian yang mengalami penambahan panjang yang cukup signifikan. PSAK 1 mengatur bahwa bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus mencakup hal-hal berikut:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan (yang biasanya disebut ‘dasar akuntansi’)
2. Setiap kebijakan akuntansi spesifik yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memuat ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, konsistensi kebijakan akuntansi, dan perubahan kebijakan akuntansi.

Tentang pemilihan kebijakan akuntansi, PSAK 25 mengatur bahwa:

1. Bila suatu standar secara khusus berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, kebijakan akuntansi harus ditentukan dengan menerapkan standar tersebut dan dengan memperhitungkan semua panduan penerapan terkait.
2. Bila tidak ada standar khusus yang berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, manajemen harus menggunakan penilaiannya sendiri dalam membuat dan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang bersifat:
 - a. Relevan dengan kebutuhan pengguna terkait pembuatan keputusan; dan
 - b. Andal, yang berarti bahwa laporan keuangan: (i) mencerminkan hasil dan posisi keuangan entitas itu secara tepat, (ii) mencerminkan substansi ekonomi dari peristiwa dan transaksi dan bukan hanya bentuk formalnya saja, (iii) netral dan bebas dari bias, (iv) apa adanya, (v) lengkap dalam hal materi laporan.

Dalam membuat penilaian yang disebutkan di atas, manajemen harus merujuk dan memperhitungkan ketepatan sumber-sumber berikut secara berurutan:

1. Persyaratan dan panduan standar yang mengatur isu-isu serupa dan terkait.
2. Definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang termuat dalam Kerangka.
3. Keputusan badan standar akuntansi lain dan praktik yang diterima di industri sejauh keduanya konsisten dengan butir (a) dan (b) di atas.

PSAK 1 lebih lanjut mensyaratkan bahwa suatu entitas mengungkapkan penilaian manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas itu yang paling berdampak signifikan terhadap angka-angka yang diakui dalam laporan keuangan. Contoh penilaian yang berhubungan dengan apakah pada dasarnya segala risiko dan imbalan kepemilikan aset keuangan dialihkan, dan penilaian yang berhubungan dengan apakah transaksi tertentu merupakan transaksi pendanaan dan bukan transaksi penjualan.

Pada periode setelah adopsi IFRS, ikhtisar kebijakan akuntansi penting mengungkapkan mengenai standar dan interpretasi standar akuntansi baru beserta revisi. Prinsip-prinsip konsolidasi dijabarkan secara rinci mengenai kombinasi bisnis, kombinasi bisnis antara entitas pengendali, entitas anak, pelepasan entitas anak, dan entitas asosiasi. Selain itu pada penjabaran mata uang asing dijelaskan pula mengenai mata uang fungsional dan penyajian, transaksi dan saldo, dan entitas dalam grup.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi pada laporan keuangan konsolidasian, perusahaan harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset

dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Hal-hal yang bersifat penting mengenai pemilihan ataupun penilaian kebijakan akuntansi dan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan, selanjutnya akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga mempengaruhi panjang laporan keuangan perusahaan.

Di dalam ikhtisar kebijakan akuntansi penting, penjabaran instrumen keuangan merupakan salah satu poin yang perlu disajikan. Aturan ini tercantum dalam PSAK 50 (revisi 2010) yang berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus.

Peraturan mengenai instrumen keuangan diatur pula dalam PSAK 55 (revisi 2011) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, serta PSAK 60 mengenai Instrumen Keuangan: Pengungkapan. PSAK 55 (revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Sedangkan PSAK 60 mengatur persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan terhadap instrumen keuangan. PSAK 60 sebelumnya merupakan bagian dari PSAK 50 (revisi 2006). Pengungkapan mengenai instrumen keuangan yang berbeda dari peraturan sebelumnya yaitu tentang ruang lingkup yang sebelumnya belum diatur, menegaskan signifikansi dari instrumen keuangan, dan penjelasan lebih rinci mengenai risiko likuiditas. Dari penerapan PSAK-PSAK tersebut catatan atas laporan keuangan setelah periode adopsi IFRS akan menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrument keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

Penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) pada dasarnya tidak memiliki dampak yang signifikan dalam penambahan panjang laporan keuangan, khususnya pada catatan atas laporan keuangan. Peraturan yang memiliki dampak signifikan pada penambahan panjang laporan keuangan yaitu penerapan PSAK 60. PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan signifikan instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerja; beserta sifat dan tingkat yang timbul dari resiko keuangan perusahaan dan entitas anaknya yang terekspos selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola resiko.

Salah satu bagian yang berbeda dalam catatan atas laporan keuangan sebelum dan sesudah periode adopsi IFRS adalah mengenai pengungkapan tentang sumber estimasi ketidakpastian. Pengungkapan tersebut tercantum dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan tahun 2013. Hal ini diatur dalam PSAK 1 yang mensyaratkan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian atas informasi dalam laporan keuangan. Perusahaan mengungkapkan asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan dan bisa mengakibatkan penyesuaian material terhadap pos-pos dalam laporan keuangan periode berikutnya (paragraf 122).

Contoh pengungkapan ini dapat terjadi pada perusahaan pertambangan emas yang terpapar risiko harga emas dunia yang fluktuatif. Apabila pada akhir periode pelaporan, harga emas sedang jatuh dan diperkirakan akan terus jatuh sampai tahun berikutnya, maka fakta tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tahun

berikutnya. Contoh lainnya asumsi tentang perubahan suku bunga jika entitas mempunyai aset dan liabilitas keuangan berbunga, asumsi tentang dampak teknologi lama terhadap persediaan, jika entitas mempunyai persediaan berteknologi tinggi dalam jumlah besar, dan asumsi tentang hasil litigasi dalam proses di masa depan jika entitas telah menyediakan penyisihan dalam jumlah besar untuk kerugian kontinjensi.

Pada tanggal 1 Januari 2012, diberlakukan PSAK 24 (revisi 2010) mengenai imbalan kerja. Penerapan PSAK juga berdampak pada penambahan panjang laporan keuangan, khususnya pada catatan atas laporan keuangan di tahun 2013. Pengungkapan imbalan kerja yang berlaku di perusahaan melalui PSAK 24 harus dihitung dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini berisi tentang:

1. Imbalan yang diatur dalam program formal atau perjanjian formal antara individual pekerja, serikat pekerja atau perwakilan pekerja dengan perusahaan
2. Imbalan yang diatur dalam peraturan perundangan atau peraturan industri dan perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan di peraturan. Juga ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program nasional, industri, atau program multi pemberi kerja.
3. Imbalan yang tidak diatur secara formal di perusahaan, akan tetapi imbalan tersebut bersifat konstruktif (atau bersifat menjadi kebiasaan dan keharusan). Kriteria dari kewajiban konstruktif ini adalah jika perusahaan menghilangkan imbalan, maka akan terjadi perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Kemudian kriteria lainnya adalah bahwa pembayaran imbalan konstruktif menyebabkan perusahaan tidak punya pilihan lain selain membayarkannya.

Imbalan pasca kerja dalam termasuk dalam PSAK 24 dan perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

1. Imbalan kerja jangka pendek, yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan
2. Imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja tidak aktif lagi bekerja
3. Imbalan kerja jangka panjang, yaitu imbalan yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, dan
4. Imbalan Pemutusan Kontrak Kerja (PKK), yaitu imbalan kerja yang diberikan karena perusahaan berkomitmen untuk:
 - a. Memberhentikan seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal
 - b. Menawarkan pesangon PHK untuk pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara suka rela (*golden shake hand*). Imbalan ini dimasukkan ke dalam pernyataan PSAK 24 jika dan hanya jika perusahaan sudah memiliki rencana secara jelas dan detail untuk melakukan PKK dan kecil kemungkinan untuk membatalkannya.

Penambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas & Aset Kontinjensi yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011. PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini ditujukan agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan:

1. nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
2. provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada;
3. jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan;
4. jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan; dan
5. peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.

Entitas juga harus mengungkapkan pula:

1. uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi;
2. indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar, jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan
3. jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian.

Dalam catatan atas laporan keuangan setelah periode adopsi IFRS, pengungkapan risiko merupakan salah satu hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan informasi risiko ini merupakan salah satu penyebab penambahan panjang pada catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tersebut disyaratkan dalam PSAK 1. Pengungkapan informasi risiko harus memadai agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Pengungkapan informasi risiko perusahaan perlu dilakukan secara berimbang artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko manajemen. Permintaan para pemegang saham terhadap pengungkapan yang lebih transparan dalam laporan keuangan membuat perusahaan-perusahaan melakukan perluasan terhadap wilayah pengungkapannya dalam laporan tahunan, dengan membuat pengungkapan mengenai informasi-informasi nonkeuangan yang dianggap lebih relevan dan transparan sebagai bentuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan perusahaan sebelum dan setelah periode adopsi IFRS rata-rata mengalami peningkatan panjang. Namun hasil uji *Wilcoxon* menunjukkan bahwa pada laporan utama tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Meskipun begitu, dari jumlah sampel yang diuji, perusahaan yang mengalami peningkatan panjang halaman pada laporan utama jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang mengalami penurunan.
2. Hasil analisis uji *t* pada catatan atas laporan keuangan menunjukkan hipotesis diterima. Peningkatan yang terjadi pada catatan atas laporan keuangan nilainya signifikan. Dengan begitu dapat ditarik simpulan bahwa terdapat perbedaan panjang yang signifikan antara catatan atas laporan keuangan sebelum dan sesudah periode adopsi IFRS.

3. Penambahan panjang laporan utama terutama terjadi akibat akun pendapatan komprehensif lain, terutama untuk transaksi yang berasal dari laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual serta akibat selisih kurs penjabaran mata uang asing. Selain pada laporan laba rugi, akun pendapatan komprehensif lain akan muncul dalam laporan perubahan ekuitas perusahaan.
4. Peningkatan panjang catatan atas laporan keuangan secara statistik lebih signifikan dibandingkan peningkatan panjang pada laporan utama. Penambahan panjang ini antara lain disebabkan oleh tambahan persyaratan pada PSAK 1 (revisi 2009) mengenai penyajian laporan keuangan yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang tinggi pada laporan keuangan. Selain itu disyaratkan pula mengenai pengungkapan tentang sumber estimasi ketidakpastian dan pengungkapan informasi risiko.
5. Selain PSAK 1, penambahan panjang catatan atas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh penerapan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan, PSAK 50 (revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 mengenai Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 24 (revisi 2010) mengenai Imbalan Kerja, serta PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas & Aset Kontijensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahalik, 2013. *PSAK Terkini Berbasis IFRS Terkait OCI*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009)*, Ikatan Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 2 (Revisi 2009)*, Ikatan Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Revisi 2010)*, Ikatan Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 25 (Revisi 2009)*, Ikatan Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2010)*, Ikatan Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2011)*, Ikatan Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 57 (Revisi 2009)*, Ikatan Akuntansi Keuangan, Jakarta.

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60 (Revisi 2010)*, Ikatan Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Giri, E. F., 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah 1 Perspektif IFRS*. Edisi 1, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harahap, S. S., 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartikahadi, H., dkk., 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Morunga, M., dan Bradbury, M.E., 2013. The Impact of IFRS on Annual report Length. *Australian Accounting, Business and Finance Journal*, Vol 6 (5): 47-62.
- Patralalita, C. W., 2014. *Dampak Adopsi IFRS Terhadap Panjang Laporan Keuangan Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purba, M. P., 2009. *International Financial Reprting Standards Konvergensi dan Kendala Aplikasinya di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- www.ifrs.com